

Nomor Daftar FPIPS : 4044/UN40.F2.1/PT/2023

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM PROGRAM
GERAKAN ANTIKORUPSI DI PROVINSI JAWA BARAT**

SKRIPSI

*Disusun untuk memenuhi salah satu sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*



Oleh

Muhamad Ilham Maulana

1908348

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2023

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM PROGRAM
GERAKAN ANTIKORUPSI DI PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh

Muhamad Ilham Maulana

NIM: 1908348

Sebuah Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

**© Muhamad Ilham Maulana
Universitas Pendidikan Indonesia
2023**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruh atau sebagian, dengan dicetak ulang, fotocopy, atau cara lainnya tanpa izin penulis.

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PROGRAM
GERAKAN ANTIKORUPSI DI PROVINSI JAWA BARAT

Muhamad Ilham Maulana

1908348

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Disetujui dan disahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.A.P., S.H., M.H., M.Si.

NIP. 19660929 199402 1 001

Pembimbing II



Kanigara Hawari, S.H., M.H.

NIP. 19930107 201903 1 012

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Dr. Susan Fitriyani, M.Pd.

NIP. 19820730 200912 2 004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

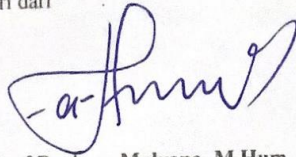
Skripsi telah diuji pada

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023

Tempat : Gedung Nu'man Somantri FPIPS UPI

Panitia Ujian terdiri dari :

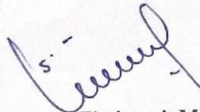
1. Ketua :



Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum.

NIP. 19660808 199103 1 002

2. Sekretaris :




Dr. Susan Fitriyasari, M.Pd.

NIP. 19820730 200912 2 004

3. Penguji :

Penguji I



Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si

NIP. 19700814 199202 1 001

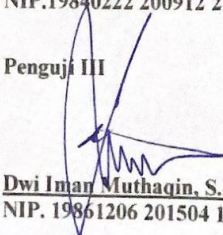
Penguji II



Dr. Leni Anggraeni, M.Pd.

NIP. 19840222 200912 2 014

Penguji III



Dwi Iman Muthaqin, S.H., M.H.

NIP. 19861206 201504 1 001

ABSTRAK

PERAN PARTAI POLITIK DALAM PROGRAM GERAKAN ANTI KORUPSI DI PROVINSI JAWA BARAT

Maraknya tindak pidana korupsi yang ada di Provinsi Jawa Barat yang melibatkan kader partai politik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran dan fungsi partai politik sebagai wahana politik dalam menciptakan gerakan antikorupsi di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan dan teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, serta melakukan validitas data. Dalam penelitian ini terdapat tiga partai yang diteliti yakni Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat, juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat dan Pakar Antikorupsi. Pada akhirnya penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Provinsi Jawa Barat kader politik yang berintegritas, khususnya dalam kasus korupsi. Sehingga hasil dari penelitian ini bahwa partai politik memiliki peranan penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi yang dapat membentuk moralitas antikorupsi sebagai wujud gerakan antikorupsi.

Kata Kunci: Peran, Partai Politik, Gerakan Antikorupsi, Jawa Barat

ABSTRACT

THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN THE PROGRAM ANTI-CORRUPTION MOVEMENT IN WEST JAVA PROVINCE

The rise of corruption in West Java province involving political party cadres. So this study aims to provide an overview of the role and function of political parties as a political vehicle in creating anti-corruption movement in West Java province. This research uses qualitative approach and Case Study Method. Data collection techniques carried out in this study by interview, observation, documentation, and literature studies and data analysis techniques by means of data reduction, data presentation, conclusion and verification, and data validity. In this study, there are three parties studied, namely the Regional Leadership Council of Keadilan Sejahtera Party of West Java Province, the Regional Leadership Council of Golongan Karya Party of the West Java province and the Regional Leadership Council of Demokrasi Indonesia Perjuangan Party of West Java province, as well as the National Unity and Politics Agency, the West Java provincial Attorney General's office and anti-corruption experts. In the end, this study can provide an overview of West Java Province political cadres with integrity, especially in cases of corruption. so that the results of this study that political parties have an important role in internalizing anti-corruption values that can shape anti-corruption morality as a form of anti-corruption movement.

Keywords: Role, Political Party, Anti-Corruption Movement, West Java

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang atas berkah rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Partai Politik Dalam Program Gerakan Antikorupsi di Provinsi Jawa Barat (Sholawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang setia mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu, skripsi ini dibuat untuk menambah bidang kajian ilmu Pendidikan Pancasila dan pembaca umum.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP.,S.A.P., S.H., M.H., M.Si. dan Kanigara Hawari S.H, M.H. atas segala bimbingan dan arahan beliau demi terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masihterdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkansaran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umum. *Aamiin Ya Rabbal A'lamiiin.*

Bandung, Juli 2023



Muhamad Ilham Maulana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Negara Hukum Pancasila	10
2.1.1 Negara Hukum	10
2.1.2 Hakikat Pancasila	15
2.2 Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia	26
2.2.1 Pengertian Korupsi	26
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana	28
2.2.3 Ciri dan Jenis Tindak Pidana Korupsi	30
2.2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi	34
2.2.4 Gerakan Antikorupsi	36
2.3 Partai Politik	40
2.3.1 Pengertian Partai Politik	40
2.3.2 Tipologi Partai Politik	44
2.3.3 Fungsi Partai Politik	46
2.4 Penelitian Terdahulu	51
2.4 Kerangka Berpikir	53
BAB III METODE PENELITIAN	54

3.1 Desain Penelitian	54
3.2 Partisipan Penelitian	55
3.3 Tempat Penelitian.....	56
3.4 Instrumen Penelitian.....	56
3.4.1 Instrumen Observasi	57
3.4.2 Instrumen Wawancara.....	58
3.5 Prosedur Penelitian	58
3.5.1 Tahap Persiapan Penelitian	58
3.5.2 Prosedur Perizinan Penelitian	58
3.5.3 Tahap Pelaksanaan Penelitian.....	59
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.6.1 Pengumpulan Data dengan Observasi.....	60
3.6.2 Pengumpulan Data dengan Wawancara	61
3.6.3 Pengumpulan Data dengan Dokumentasi	61
3.7 Analisis Data	62
3.7.1 Reduksi Data	63
3.7.2 Penyajian Data	63
3.7.3 Verifikasi.....	64
3.8 Validitas Data.....	64
3.8.1 Perpanjangan Pengamatan	64
3.8.2 Meningkatkan Ketekunan	64
3.8.3 Triangulasi.....	65
3.8.4 Member Check.....	66
3.9 Jadwal Penelitian.....	67
BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1 Hasil Temuan	68
4.1.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	68
4.1.2 Data Hasil Temuan	80
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	110
4.2.1 Persepsi Partai Politik Terhadap Program Gerakan Antikorupsi	110
4.2.2 Implementasi Program Antikorupsi Partai Politik Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	113

4.2.3 Sikap Partai Politik Terhadap Kader Partai Politik Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Dikaitakan Dengan Gerakan Antikorupsi.....	118
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN.....	123
5.1 Kesimpulan	123
5.1.1 Kesimpulan Umum	123
5.1.2 Kesimpulan Khusus.....	123
5.2 Implikasi.....	124
5.3 Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	56
Partisipan Penelitian	56
Tabel 3.2	67
Jadwal Penelitian	67
Tabel 4.1	70
Daftar Pimpinan DPW PKS Jawa Barat	70
Tabel 4.2	73
Pimpinan DPD Partai Golkar 2020-2024	73
Tabel 4.3	77
Pimpinan DPD PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024	77
Tabel 4.4	78
Daftar Pimpinan Bakesbangpol	78
Tabel 4.5	80
Pimpinan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	80
Tabel 4.6	81
Partisipan Penelitian	81
Tabel 4.7	85
Triangulasi Sumber Data(1)	85
Tabel 4.8	97
Rekapitulasi Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021-2023	97
Tabel 4.9	100
Triangulasi Sumber Data (2)	100
Tabel 4.10	107
Triangulasi Hasil Data(3)	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	3
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2012-2022	3
Gambar 2.1	34
Teori Segitiga Penipuan (The Fraud Triangle)	34
Gambar 2.3 Nilai-Nilai Antikorupsi	36
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Penelitian	53
Gambar 3.1	59
Skema Penelitian	59
Gambar 3.2	65
Triangulasi Sumber	65
Gambar 3.3 Triangulasi Teknik	66
Gambar 4.1	69
Logo Partai Keadilan Sejahtera	69
Gambar 4.2	72
Logo Partai Golongan Karya	72
Gambar 4.3	76
Logo Partai PDI Perjuangan	76
Gambar 4.6 Training for Trainer Pembimbing dan Pembina UPA	86
Gambar 4.7 Seminar Anti Korupsi yang dilakukan Badan Kaderisasi Partai PKS	87
Gambar 4.8	87
Pendidikan Kepemimpinan dan Kaderisasi DPW PKS Provinsi Jawa Barat	87
Gambar 4.9	89
Pendidikan Politik Tingkat Provinsi Jawa Barat	89
Gambar 4.10	90
Pendidikan Politik (Dikpol) Tingkat Kabupaten	90
Gambar 4.11	91
Sinergitas KPK dan Partai Golkar dalam Kegiatan Pembekalan Antikorupsi Partai Politik	91
Gambar 4.12	92

Sekolah Partai yang dilaknakan DPP Partai PDI Perjuangan dalam Kegiatan Pembekalan Antikorupsi Partai Politik.....	92
Gambar 4.13	93
Pendidikan Antikorupsi Partai PDIP	93
Gambar 4.14	93
Sinergitas KPK dan Partai PDIP dalam Kegiatan Pembekalan Antikorupsi Partai Politik.....	93

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affandi, Idrus. dkk. (2017). *Bedah Buku Political Education dari Robert Brownhill dan Patricia Smart*. Kencana Utama
- Allan R. Brewer-Carias. (1989). *Judicial Review in Comparative Law*. Cambridge University Press.
- Alkostar, A. (2008). *Korupsi Politik Di Negara Modern*. FH UII Press.
- Al Muchtar, S. (2020). *Teori dan Konstitusionalisme Indonesia*. Gelar Pustaka Mandiri.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press,
- Atmadja, A. T., & Atmadja, N. B. (2019). *Sosiologi Korupsi*. Prenamedia Grup.
- Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia*. VI Press
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Choiri, M (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Nata Karya.
- Creswell, J. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi 4*. Pustaka Pelajar
- Darmodiharjo, D. (1978). *Santiaji Pancasila: suatu tinjauan filosofis, historis, dan yuridis konstitusional*. Usaha Nasional.
- Driyakara. (1978). *Percikan Filsafat*. Pembangunan Nasional
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Edisi Kedu)*. Sinar Grafika.
- Emzir. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Rajawali Pers.
- Firmanzah. (2018). *Mengelola partai politik : komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi (Cetakan ketiga)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamid, P. (2007). *Metode Penelitan Kualitatif*. Alfabeta.
- Indrawan, R. (2014). *Metodelogi Penelitian*. Refika Aditama.
- Kaelan, H. (2009). *FILSAFAT PANCASILA (EDISI KETI)*. PARADIGMA.
- Kaelan, H. (2018). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya. In Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya* PARADIGMA.
- Kansil C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Cetakan Ke)*. Balai Pustaka.
- Kesuma, D., Darmawan, C., & Permana, J. (2009). *KORUPSI DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI*. Pustaka Aulia Press.
- Kismawadi, E. R., Al-Muddatstsir, U. D., & Hamid, A. (2020). *Fraud pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*. RajaGrafindo Persada.
- M Yusuf Muri, A. (2009). Muri Yusuf, M. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Gabungan*. Prenadamedia Group.

- Nawangasasi (2016). *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Cyber Law Terkait Data Pribadi Dan Beschiking Digitalisasi*. PT.Alumni
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Popouler*. Pantjuran Tujuh.
- Pito, T. A., IP, S., Efriza, S., Fasyah, K., & IP, S. (2006). *Mengenal teori-teori politik: dari sistem politik sampai korupsi*. Nuansa Cendekia.
- Sarja (2016). *Negara Hukum: Teori dan Praktek*. Thafa Media
- Satori, D. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sedarmayanti.(2007). *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Mandar Maju
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G*. Alfabeta.
- Sunoto. H. (1985). *FILSAFAT SOSIAL DAN POLITIK PANCASILA (Edisi Pert)*. ANDI OFFSET.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Priyono, H. (2018). *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta.
- Widayati. (2016). *NEGARA HUKUM, KONSTITUSI, DAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN*. UNISSULA PRESS.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Pustaka Reka Cipta
- Zuhroh,dkk. (2020) *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer*. Adab Press.
- Zubair, C. . (1997). *Etika Rekaya Menurut Konsep Islam*. Pustaka Pelajar.

Artikel Jurnal

- Alkostar, A. (2009). Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16, 155–179. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3871/3446>
- Arsyad, A., & Mh, S. H. (2002). *Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*. *Educitizen* , Vol. 2 No. 1 Mei 2017 118. (2017). 2(1), 118–129.
- Darmawan, C. (2015). Legislative strengthening and empowerment: Efforts to strengthen local governance and accountability through provincial parliaments in Indonesia. *American Journal of Applied Sciences*, 12(11), 802–809. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2015.802.809>
- Darmawan, C. (2020). *Mengasah Keterampilan Sosial Politik dan Bela Negara Generasi muda* (M. Setiawan (ed.)). Putra Anugerah Media.
- Ilahi, R., Zed, M., & Erniwati, E. (2019). M. Zen Gomo dalam Gerakan Anti Korupsi pada Dekade I Reformasi di Sumatera Barat. *Galanggang Sejarah*, 1–16. <http://ejournal.pamaaksara.org/index.php/ga/article/view/4>
- Kaelan. (1996). Kesatuan Sila-sila Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 1(1), 42–52. <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31640>
- Kaelan. (2017). *Membangun Karakter Guru menjadi Smart and Good Citizen*.

- Jurnal PKN Progresif*, 7(1), 64–84.
- Kaelan. (2017). Peran Filsafat Bagi Pengembangan Daerah Dan Peningkatan Semangat Kebangsaan. *Jurnal Filsafat*, 17(2), 166–181.
- Pendidikan, F., & Pengetahuan, I. (2022). *Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi universitas pendidikan indonesia fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial*. 022, 2013163.
- Program, K., Ilmu, S., Islam, A., Magister, P., Ilmu, F., & Islam, A. (2022). *Surat keterangan*. 57, 2022.
- Sarmiasih, M., & Pratama, P. Y. (2020). Dukungan Kolektif Civil Society Dalam Pengarusutamaan Gerakan Anti Korupsi Di Indonesia. *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 1–11. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/3>
- Satria Buana, M., Erlina, E., & Yulia Rahman, E. (2021). Paradigma Pendidikan Politik Antikorupsi dan Kesetaraan Gender di Partai Politik. *Integritas*, 7(1), 23–42. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.733>
- Suyatmiko, W., Nicola, A., & Fajrin, N. (2019). *Laporan Pemantauan Mandiri Kelompok Masyarakat Sipil Terhadap Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019*. 1–52.
- Widoyoko, J. D. (2016). Menimbang peluang Jokowi memberantas korupsi: Catatan untuk gerakan anti korupsi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 269–297. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/134%0Ahttps://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/134/32>

Sumber Internet

- Transparency Internasional*. (2022). **Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2012-2022** <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2022). *Nilai-Nilai Antikorupsi* <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/sosial-budaya/infografis/nilai-nilai-antikorupsi/>